



| | |
|--------------|--|
| TAJUK | <p style="text-align: center;">Segera Wujudkan Desentralisasi Sampah untuk Cegah Pembuangan Ilegal</p> <p>Sejumlah daerah terutama di wilayah pedalaman menjadi sasaran penyelundupan sampah. Antara lain terjadi di Paliyan, Gunungkidul dan di Jalan Imogiri-Panggang, di Imogiri Bantul. Sampah diduga dari luar daerah diangkut dengan truk dan dibuang sembarangan. Di Bantul, praktik pembuangan sampah secara ilegal ini terekam kamera CCTV.</p> <p>Pembuangan sampah ilegal bermunculan imbas dari darurat sampah yang masih belum terpecahkan di DIY. Apalagi tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Piyungan yang selama ini menjadi tumpuan tiga wilayah di Bumi Mataram yakni Kota Jogja, Bantul, dan Sleman resmi sudah ditutup. Otomatis saat ini, pengolahan sampah diserahkan ke masing-masing wilayah atau desentralisasi.</p> <p>Masalahnya, tidak semua daerah di Bumi Mataram mampu mengolah sampah. Sebagai contoh Kota Jogja, setiap harinya ada 200 ton sampah yang harus ditangani. Sayangnya, Pemkot hanya bisa mengolah sekitar 150 ton sampah saja. Masih ada 50 ton sampah setiap harinya yang tidak bisa diolah.</p> <p>Sebanyak 150 ton sampah itu diolah di tiga Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> (TPS3R) yang sudah dibangun Pemkot Jogja. Dalam sehari TPS3R Nitikan mampu mengolah hingga 75 ton sampah per hari. Kemudian di TPS3R Kranog dan Karangmiri mampu mengolah 40-45 ton. Selain itu, Pemkot Jogja menggandeng swasta untuk mengatasi masalah sampah yang belum bisa tertangani di TPS3R yang dimiliki.</p> <p>Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Bantul, dan Sleman. Saat ini, kedua wilayah itu juga tengah berpacu membangun fasilitas pengolahan sampah untuk mengatasi darurat sampah yang ada. Melihat fakta di lapangan pemerintah nyatanya belum mampu menyediakan tempat pembuangan sampah yang representatif. Di sisi lain masyarakat juga belum teredukasi dengan baik sehingga membuang sampah sembarangan.</p> <p>Pemerintah daerah terutama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Satpol PP kudu gerak cepat untuk mencegah praktik pembuangan sampah ilegal seperti saat ini agar tak semakin meluas. Demikian pula peran warga juga diperlukan untuk sama-sama mengawasi wilayahnya.</p> <p>Pasalnya, tidak sembarangan lokasi bisa dijadikan tempat pembuangan sampah. Jika sudah menjadi tempat pembuangan sampah lokasi itu tidak lagi bisa jadi permukiman karena tanah sudah tercemar.</p> <p>Terpenting lagi adalah mempercepat pembangunan sejumlah fasilitas TPST agar krisis sampah di DIY segera berakhir. Gelontorkan anggaran, sumber daya manusia dan peralatan semaksimal mungkin untuk mempercepat desentralisasi sampah.</p> |
|--------------|--|

| | Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1. | | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005